



Dana Otsus Perlu Aturan Khusus

JAKARTA- Pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang nilainya triliunan rupiah masih menyisakan masalah tersendiri dalam penerapan di lapangan. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan, regulasi perundang-undangan nasional yang ada saat ini membuat dana otsus tidak bisa terserap maksimal karena proses dan aturan yang rumit dan berbelit.

"Dana sulit terserap maksimal karena pejabat setempat ekstra hati-hati dalam penggunaannya. Mereka tidak mau masuk penjara karena dinilai salah dalam mengelola dana ini," tukas Eddy dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat Serta Pemasalahan Hukumnya' di Jakarta, Selasa, (7/7). Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua BPK RI Azhar Aziz, Anggota VI BPK Bahrullah Akbar, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek dan sejumlah gubernur-bupati se-Papua dan Papua Barat.

Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar menyatakan, banyak pasal-pasal perundangan yang membuat pihaknya tidak bisa leluasa mengembangkan daerah dengan dana otsus. "Harus ada kelonggaran. BPK kita minta tidak terlalu kaku dan tak ada kompromi. Kita memiliki banyak keterbatasan," ungkapny. Tonny menambahkan, jika tidak ada toleransi, bisa dipastikan selamanya pihaknya hanya akan mendapat predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan tidak pernah dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Anggota VI BPK Bahrullah Akbar menyambut baik sejumlah saran dan masukan yang dilon-tarkan para pemangku kebijakan dari Papua. Pihaknya berharap acara yang digagas pihaknya ini bisa memberi solusi atas permasalahan yang ada di Papua. "Kita akan terus dorong Papua untuk maju dan berkembang seperti daerah lainnya. Untuk itu, kita harus sering duduk bareng menentukan langkah terbaik," tukasnya.

Pihaknya meminta para bupati di Papua untuk menggalakkan kegiatan Jumat bersih, sehingga nantinya tidak ada lagi pejabat Papua yang dipidanakan karena lalai membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya. (yon/jpnn)